

Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Implikasi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas

Faesal Gibran¹, Sayyid Ahmad Walmukmin², Resbi Irmayani³ Muhammad Budi Utama⁴

¹²³⁴Akademi Bisnis Lombok

Article Info

Article history:

Accepted: 25 Februari 2026

Publish: 01 Maret 2026

Keywords:

Information technology;
public financial management;
transparency;
accountability;

Abstract

This article looks at how information technology (IT) is used in public financial management to improve transparency and accountability. With the background of administrative reforms that focus on good governance, this research highlights the role of IT in digitalizing financial systems, such as real-time record-keeping and digital payments, which can strengthen administrative efficiency and oversight. However, implementing IT often faces challenges like limited human resources, infrastructure, and cultural resistance within bureaucracy. The study uses a qualitative approach with a literature review method, analyzing 50 documents from 2000 to 2025 through inductive thematic analysis. The results show three main themes: IT as a tool for integration and efficiency; challenges in implementation within organizational dynamics; and positive implications for transparency and accountability, although these depend on the institutional context. The discussion interprets these findings holistically, emphasizing the need for cultural adaptation and oversight mechanisms for optimal results. Theoretically, this research strengthens the use of qualitative approaches in public financial studies; practically, it encourages staff training and inclusive policies; and recommends integrating IT with independent audits to build public trust. The limitations of the method can be addressed through mixed-method research in the future.

Article Info

Article history:

Accepted: 25 Februari 2026

Published: 01 Maret 2026

Abstrak

Artikel ini membahas pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan publik sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan good governance, penelitian ini menyoroti peran TI dalam digitalisasi sistem keuangan, seperti pencatatan berbasis real-time dan pembayaran digital, yang berpotensi memperkuat efisiensi administrasi dan pengawasan. Namun, penerapan TI sering menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta resistensi budaya birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis 50 dokumen dari tahun 2000 hingga 2025 melalui analisis tematik induktif. Hasil menunjukkan tiga tema utama: TI sebagai alat integrasi dan efisiensi; tantangan implementasi dalam dinamika organisasi; serta implikasi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun bergantung pada konteks institusional. Pembahasan menginterpretasikan temuan secara holistik, menekankan perlunya adaptasi budaya dan mekanisme pengawasan untuk mencapai optimalisasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan kualitatif dalam studi keuangan publik; secara praktis, mendorong pelatihan SDM dan kebijakan inklusif; serta merekomendasikan integrasi TI dengan audit independen untuk membangun kepercayaan publik. Keterbatasan metode dapat diatasi dengan penelitian campuran di masa depan.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#).



Corresponding Author:

Faesal Gibran

Akademi Bisnis Lombok

Email Coresspoden: faesalgibranakunperibadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, reformasi tata kelola pemerintahan menjadi prioritas dalam upaya mencapai pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan publik dianggap sebagai aspek strategis karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Meningkatnya tuntutan publik terhadap kejelasan informasi keuangan menyebabkan kekurangan dalam kemampuan pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara efektif, yang menjadi bagian dari penerapan prinsip *good governance* (Anisa Hamid dkk., 2025; Mardiasmo, 2018). Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah mulai menggunakan teknologi informasi sebagai alat utama dalam reformasi pengelolaan keuangan publik. Penerapan sistem informasi keuangan dan pembayaran digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta transparansi pengelolaan anggaran. Suryanto dan Ratna Meisa Dai (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem keuangan publik memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diawasi, sehingga memperkuat mekanisme kontrol dan akuntabilitas keuangan negara (Heeks, 2020).

Namun, pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik tidak selalu berjalan optimal. Anisa Hamid dkk. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja birokrasi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik (Dwiyanto, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan publik memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi. Suryanto dan Ratna Meisa Dai (2025) menekankan bahwa sistem pembayaran digital mampu mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya administrasi, serta memperkuat pelacakan aliran dana publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih kurang dalam memahami aspek-aspek hasil kebijakan serta kurang mendalam mengenai proses implementasi dan pengalaman aktor dalam praktik pengelolaan keuangan digital (Heeks, 2020; Anisa Hamid dkk., 2025).

Oleh karena itu, penelitian kualitatif menjadi relevan untuk dilakukan guna menggali secara mendalam mengenai bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan memahami persepsi, pengalaman, serta dinamika yang dihadapi oleh para aktor terkait, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya sebagaimana dikemukakan oleh Anisa Hamid dkk. (2025) serta Suryanto dan Ratna Meisa Dai (2025), dan memberikan kontribusi konseptual serta praktis dalam penguatan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di era digital (Creswell, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam praktik pengelolaan keuangan publik di lingkungan pemerintahan, mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun budaya organisasi, dan menganalisis kontribusi pemanfaatan teknologi informasi terhadap penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Publik dan Prinsip Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan publik dan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan proses perencanaan dan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemerintah kepada publik atas setiap penggunaan sumber daya negara. Akuntabilitas keuangan menjadi

indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah, karena mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola dana publik secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Musgrave, 1959; OECD, 2017; Chan, 2003; IMF, 2019).

Anisa Hamid dkk. (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan sektor publik tidak semata-mata menyangkut pelaporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penyajian informasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan publik modern (Heald, 2003; Anisa Hamid dkk., 2025; Bovens, 2007; United Nations, 2022).

Peran teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan sektor publik. Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi memungkinkan integrasi data, percepatan proses administrasi, serta peningkatan akurasi pelaporan keuangan. Teknologi informasi berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah (United Nations, 2018; World Bank, 2020; Avgerou, 2008; Janssen & Estevez, 2013). Menurut Anisa Hamid dkk. (2025), penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi dan akuntabilitas keuangan. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pencatatan transaksi secara lebih sistematis, meminimalkan kesalahan manusia, serta menyediakan jejak *audit* yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengawas maupun masyarakat (Anisa Hamid dkk., 2025; Heeks, 2006).

Digitalisasi sistem keuangan publik dan transparansi.

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan bagian dari transformasi digital sektor pemerintahan. Salah satu bentuk nyata dari digitalisasi tersebut adalah penerapan sistem pembayaran digital dan sistem informasi keuangan terintegrasi. Digitalisasi memungkinkan transaksi keuangan dicatat secara *real-time*, terdokumentasi dengan baik, serta mudah ditelusuri (World Bank, 2020; OECD, 2021; Janssen & Estevez, 2013; United Nations, 2022). Suryanto dan Ratna Meisa Dai (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran dalam keuangan publik memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi.

Sistem *digital* memungkinkan keterbukaan informasi mengenai aliran dana publik, sehingga memperkuat mekanisme pengawasan dan mendukung *audit* yang lebih terbuka. Transparansi ini menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara (Suryanto dan Ratna Meisa Dai, 2025; United Nations, 2018; Chan, 2003; Bovens, 2007). Meskipun digitalisasi mendorong peningkatan transparansi, keterbukaan informasi saja tidak secara otomatis menjamin akuntabilitas keuangan publik apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan dan kapasitas institusional yang memadai (Heald, 2003; Bovens, 2007; OECD, 2021).

Tantangan Dalam Penerapan Teknologi Informasi Di Sektor Keuangan Publik.

Meskipun teknologi informasi menawarkan berbagai manfaat, penerapannya dalam sektor publik tidak terlepas dari berbagai tantangan. Hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memperkuat kebutuhan keterampilan teknologi, infrastruktur yang belum merata, serta ketidakmampuan aparatur terhadap perubahan budaya kerja birokrasi (Heeks, 2006; Oecd, 2017; Avgerou, 2008; Imf, 2019). Anisa Hamid dkk (2025) mengungkapkan bahwa faktor *non teknis*, seperti komitmen organisasi dan kesiapan aparatur, menjadi penentu penting keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai dan perubahan pola kerja yang adaptif, sistem teknologi informasi berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan publik (Anisa Hamid dkk., 2025; World Bank, 2020; United Nations, 2022; Janssen & Estevez, 2013).

Kesenjangan Penelitian Dan Relevansi Pendekatan Kualitatif.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Namun Suryanto Dan Ratna Meisa Dai (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar kajian masih

berfokus pada capaian dan hasil kebijakan, sementara pemahaman mengenai proses implementasi serta pengalaman aktor yang terlibat masih terbatas (United Nations, 2018; Heald, 2003; Yin, 2018; Oecd, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif guna mengeksplorasi secara mendalam bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam praktik pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika implementasi, tantangan yang dihadapi, serta makna yang dibangun oleh para aktor dalam konteks pengelolaan keuangan publik berbasis teknologi (Suryanto Dan Ratna Meisa Dai, 2025; Oecd, 2021; Bovens, 2007; Chan, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan organisasional, seperti persepsi aktor, dinamika implementasi, serta tantangan budaya dalam konteks keuangan publik. Metode studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari sumber sekunder seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, buku, dan dokumen resmi, tanpa melibatkan pengumpulan data primer di lapangan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk melengkapi kesenjangan literatur yang lebih fokus pada hasil kebijakan daripada proses implementasi (Suryanto dan Ratna Meisa Dai, 2025; Anisa Hamid dkk., 2025).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik analisis dokumen dan literatur.

Langkah-langkahnya meliputi:

- Identifikasi sumber data: Pencarian literatur dari database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan Web of Science, serta sumber resmi seperti laporan OECD, World Bank, IMF, dan United Nations. Kata kunci utama meliputi teknologi informasi pengelolaan keuangan publik, digitalisasi transparansi akuntabilitas, tantangan implementasi TI sektor publik, dan pendekatan kualitatif keuangan publik.
- Seleksi dokumen: Dipilih dokumen relevan dari tahun 2000-an hingga terkini, dengan prioritas pada studi empiris, laporan kebijakan, dan analisis kasus yang membahas implementasi TI dalam konteks pemerintahan (Heeks, 2006; OECD, 2021).
- Pengumpulan data: Dokumentasi dilakukan dengan mencatat kutipan, ringkasan, dan tema utama dari sumber, menggunakan alat seperti Mendeley atau Zotero untuk pengelolaan referensi. Data mencakup laporan implementasi, studi kasus, dan analisis tantangan dari berbagai negara. Teknik ini memastikan data yang komprehensif dan dapat diandalkan, tanpa risiko bias subjektif dari responden primer (Yin, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan metode analisis tematik dan analisis isi.

Langkah-langkahnya meliputi:

Pengkodean awal: Data dari literatur dikodekan berdasarkan tema seperti pemanfaatan teknologi informasi, tantangan dalam implementasi, dampak terhadap transparansi, dan pengalaman pelaku (Creswell, 2016).

Pengelompokan tema: Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama.

Interpretasi: Data tersebut diinterpretasikan untuk membangun narasi yang menjelaskan dinamika implementasi, dengan pendekatan triangulasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas (Yin, 2018; Anisa Hamid dkk., 2025). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo atau secara manual untuk memudahkan pengorganisasian data.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas internal dipastikan melalui triangulasi sumber (memverifikasi temuan dari berbagai literatur) dan audit jejak (dokumentasi lengkap proses analisis). Reliabilitas diperoleh dengan menerapkan prosedur standar dalam pengkodean, di mana kode diperiksa ulang oleh peneliti lain untuk memastikan konsistensi (Creswell, 2016). Keterbatasan riset literatur, seperti ketergantungan pada data sekunder, diatasi dengan fokus pada sumber yang kredibel dan up-to-date.

Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip etika akademik dengan menghindari plagiarisme melalui penulisan sitasi yang tepat, penggunaan sumber terbuka, serta tidak melakukan manipulasi data. Data pribadi tidak terlibat karena bersifat sekunder (Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* untuk menganalisis literatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik, dengan fokus pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Analisis tematik dilakukan terhadap 50 dokumen utama (jurnal, laporan, dan studi kasus) dari tahun 2000 sampai 2025 menggunakan teknik pengkodean induktif untuk mengidentifikasi tema utama. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas temuan, kemudian diklasifikasikan menjadi narasi deskriptif berdasarkan pola umum dan variasi konteks (Creswell, 2016; Yin, 2018).

Tema 1: Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Alat Integrasi dan Efisiensi

Analisis literatur menunjukkan bahwa teknologi informasi digunakan sebagai alat utama untuk mengintegrasikan data keuangan, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi pelaporan. Tema ini muncul dari pengkodean kutipan tentang sistem informasi keuangan berbasis TI, seperti ERP dan platform digital. Misalnya, dalam studi kasus di Indonesia, TI memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, mengurangi kesalahan manusia, dan menyediakan jejak audit yang bisa diakses oleh pihak luar (Anisa Hamid dkk., 2025). Tema ini juga mencerminkan pola di negara-negara maju seperti Singapura, di mana TI mendukung kerja sama lintas instansi serta mempercepat alokasi anggaran hingga 50% (United Nations, 2018; World Bank, 2020). Namun, variasi muncul di konteks negara berkembang, di mana pemanfaatan TI lebih terbatas pada aspek administratif daripada strategis.

Tema 2: Tantangan Implementasi Teknologi Informasi dalam Dinamika Organisasi

Tema kedua menyoroti hambatan dalam penerapan teknologi informasi, yang ditemukan melalui analisis narasi dari laporan tantangan utama.

Hambatan utama mencakup keterbatasan sumber daya manusia (kompetensi teknis rendah), ketidakmerataan infrastruktur, dan resistensi budaya birokrasi. Pengkodean menunjukkan bahwa faktor non-teknis seperti komitmen organisasi yang rendah menjadi penentu utama kegagalan, dengan contoh dari penelitian Heeks (2006) yang menunjukkan 70% implementasi TI di sektor publik gagal karena resistensi perubahan. Di negara seperti Brasil, kurangnya pelatihan menyebabkan sistem TI tidak optimal dan meningkatkan biaya operasional (OECD, 2017; Avgerou, 2008). Tema ini menunjukkan dinamika subjektif aktor, di mana aparaturnya kerap merasa terbebani karena perubahan pola kerja, sesuai dengan temuan Anisa Hamid dkk. (2025).

Tema 3: Implikasi Teknologi Informasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Analisis tematik menunjukkan bahwa teknologi informasi berkontribusi pada transparansi melalui aksesibilitas data arus dana dan audit terbuka, tetapi akuntabilitas bergantung pada konteks institusional. Tema ini dieksplorasi dari narasi tentang sistem pembayaran digital, yang memungkinkan masyarakat memantau pengeluaran pemerintah secara real-time dan membangun kepercayaan publik. Contoh dari Suryanto dan Ratna Meisa Dai (2025) menunjukkan peningkatan transparansi di negara dengan sistem pengawasan kuat, namun risiko manipulasi data tetap ada tanpa regulasi yang memadai. Variasi

ditemukan di konteks korupsi tinggi, di mana TI hanya meningkatkan akuntabilitas jika didukung oleh mekanisme partisipasi (Bovens, 2007; Chan, 2003; United Nations, 2022).

PEMBAHASAN

Pembahasan ini menginterpretasikan hasil penelitian secara kualitatif, dengan membangun narasi interpretatif berdasarkan teori dan konteks praktis. Metode library research memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna subjektif dari literatur tanpa generalisasi statistik, sehingga fokus pada pemahaman holistik terhadap fenomena (Yin, 2018).

Interpretasi Tema Pemanfaatan TI: Dari Alat Administratif ke Strategis

Temuan menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebagai instrumen integrasi, sesuai dengan teori Musgrave (1959) tentang pengelolaan sumber daya publik, di mana TI memperkuat efisiensi dalam konteks good governance (OECD, 2017).

Interpretasi kualitatif menunjukkan bahwa TI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun makna subjektif bagi para aktor, seperti perasaan "terhubung" melalui integrasi data. Dibandingkan dengan kajian sebelumnya yang kuantitatif (Heeks, 2006), temuan ini lebih mendalam dalam mengungkap variasi konteks, seperti di negara berkembang di mana TI berperan sebagai "jembatan" untuk modernisasi administrasi (Anisa Hamid dkk., 2025). Ini menegaskan bahwa pemanfaatan TI berkontribusi pada akuntabilitas dengan menyediakan jejak audit yang transparan, namun memerlukan adaptasi budaya untuk optimalisasi.

Dinamika Tantangan Implementasi: Resistensi sebagai Fenomena Sosial

Interpretasi tema tantangan menyoroti resistensi sebagai fenomena sosial, bukan hanya teknis, sesuai dengan teori Avgerou (2008) tentang perubahan organisasi. Analisis kualitatif mengungkap makna subjektif aktor, seperti ketakutan aparaturnya terhadap kehilangan kontrol dalam sistem digital, yang sering diabaikan dalam laporan umum (OECD, 2017). Temuan ini melengkapi Suryanto dan Ratna Meisa Dai (2025) dengan menekankan bahwa tantangan non-teknis, seperti komitmen organisasi, lebih dominan di konteks birokrasi tradisional. Dalam praktik, ini berimplikasi pada perlunya pendekatan partisipatif dalam implementasi TI, untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan kesiapan aparaturnya (World Bank, 2020).

Implikasi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas: Kepercayaan Publik sebagai Tujuan Utama

Interpretasi tematik menunjukkan bahwa TI membangun transparansi sebagai fondasi kepercayaan, tetapi akuntabilitas memerlukan interaksi antara teknologi dan institusi (Bovens, 2007). Analisis kualitatif mengungkap variasi makna: di negara stabil, TI memperkuat pengawasan; di negara rentan korupsi, ia menjadi alat potensial untuk manipulasi jika tidak ada pengawasan. Dibandingkan dengan Chan (2003), temuan ini lebih kontekstual, menekankan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci. Secara praktis, ini merekomendasikan integrasi TI dengan mekanisme audit independen untuk memastikan akuntabilitas holistik (United Nations, 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini membahas penggunaan teknologi informasi (TI) dalam pengelolaan keuangan publik, dengan fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TI berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan integrasi sistem pengelolaan keuangan publik, seperti melalui pencatatan real-time dan pembayaran digital. Hal ini berkontribusi pada peningkatan administrasi serta pengawasan. Namun, penerapan TI juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta resistensi dari kultur birokrasi. Meskipun demikian, TI tetap memberikan implikasi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, asalkan didukung oleh konteks institusional dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pendekatan kualitatif dalam studi keuangan publik, dengan menekankan peran TI sebagai mediator sosial dalam good governance. Dalam konteks praktis, temuan penelitian memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan pelatihan SDM dan

mendorong adaptasi budaya kerja yang inklusif. Dalam aspek kebijakan, diusulkan adanya integrasi TI dengan audit independen guna membangun kepercayaan publik dan mengurangi risiko manipulasi data.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan pada data sekunder, yang dapat diperbaiki melalui pendekatan penelitian campuran di masa depan, yang menggabungkan analisis literatur dengan data primer. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa TI tidak hanya merupakan alat teknis, tetapi juga elemen strategis dalam reformasi pengelolaan keuangan publik, dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, asalkan diimbangi dengan komitmen organisasional dan pengawasan yang kuat.

Implikasi Teoritis, Praktis, dan Kebijakan

Secara teoritis, hasil ini memperkuat pendekatan kualitatif dalam studi keuangan publik, dengan menunjukkan bahwa TI bukan hanya alat, tetapi mediator sosial dalam good governance.

Praktis, temuan mendorong pemerintah untuk fokus pada pelatihan SDM dan budaya adaptif. Kebijakan yang disarankan meliputi regulasi TI yang inklusif, seperti portal transparansi nasional. Keterbatasan metode (ketergantungan literatur) dapat diatasi dengan penelitian campuran di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat, para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu serta bimbingannya, rekan-rekan yang senantiasa memberi motivasi, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Avgerou, C. (2008). Information Systems in Developing Countries: A Critical Research Review. *Journal of Information Technology*, 23(3), 133-146. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000136> (Original work published 2008)
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Chan, J. L. (2003). Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards. *Public Money & Management*, 23(1), 13–20. <https://doi.org/10.1111/1467-9302.00336>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- des Nations Unies, O. (2018). United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to support transformation towards sustainable and resilient societies. *New York, NY: United Nations*.
- Dwiyanto, A. (2019). *Mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi*. Gadjah Mada.
- Hamid, A., Hermawati, P. A., & Adelia, T. D. (2025). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIC. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(03 Juli), 4627-4633.
- Heald, D. (2003). Fiscal transparency: concepts, measurement and UK practice. *Public administration*, 81(4), 723-759. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2003.00369.x>
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. Sage Publications.
- Heeks, R. (2020). Digital technology and public sector accountability. *Development Informatics Working Paper Series*, No. 85. University of Manchester.
- IMF. (2019). *Fiscal transparency handbook*. International Monetary Fund.
- Janssen, M., & Estevez, E. (2013). Lean government and platform-based governance—Doing more with less. *Government Information Quarterly*, 30, S1-S8. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.11.003>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Offset.

- Musgrave, R. A., & Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy* (Vol. 658). New York: McGraw-Hill.
- OECD. (2017). *Government at a glance*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Public finance and digital transformation*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Suryanto, S., & Dai, R. R. M. (2025). Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 13(1), 96-110.
- United Nations. (2022). *Enhancing public sector transparency and accountability through digital government*. United Nations Publications.
- World Bank. (2020). *Digital government for development: A framework for action*. World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage